

DAFTAR BACAAN**Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN.
- Attamimi, A. Hamid S., *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1993.
- Doludjawa, Linus, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2005.
- Estiko, Didit Hariadi, Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2003 dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Kaelan, *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Jakarta, 2017.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *et.al., Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Wilayah Pesisir Terpadu*, Jakarta, 2005.

Manan, Bagir, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Naja, Daeng, H.R., *Dewan Perwakilan Daerah : Bikameral Setengah Hati*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

- Surbakti, Ramlan, Kris Nurgoho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melati Study Group, Jakarta, 1997.
- Widodo, Joko, *Good Governance (Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Cendekia, Surabaya, 2001.
- Wirjono, Prodjodiko, , *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal

Aritonang, Dinoroy Marganda, “Kedudukan dan Fungsi DPD Dalam Kerangka Kelembagaan Legislatif Indonesia”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 6, No 3, 2009.

Aziz, Machmud, ‘Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No 5, 2010.

Chakim, M. Lutfi, ‘Desain Konstitusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 2, 2014.

Eddyono, Luthfi Widagdo, “Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No 1, 2017.

Hadi, Syofyan, Tomy Michael, ‘Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara’, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5, No 2, Surabaya, 2017 dikutip dari Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi ilmiah Pengukuhan Gurus Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Harun, Refly, ‘Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum’, *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, No 1, 2016.

- Laksono, Fajar, 'Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 1, Maret 2014.
- Laksono, Fajar, *et.al.*, 'Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI', *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 4, 2013.
- Nirahua, Salmon E.M., "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 4, No 18, 2011.
- Noviati, Cora Elly, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 2, 2013.
- Siahaan, Maruarar, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi', *Jurnal Hukum*, Vol 16, No 3, 2009.
- Solikhin, Ahmad, "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia", *Jurnal of Governance*, Vol 2, No 1, 2017.
- Syahrizal, Ahmad, 'Problem Implementasi Putusan MK', *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 1, 2007.
- Wirman, Hardi Putra., 'Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI : (Reformasi Fungsi, Kedudukan dan Proses Pemilihan Anggota DPD)', *Jurnal Al-Hurriyah*, dikutip dari Irman Irman Gusman, *Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI Secara Kelembagaan*, Semiloka, Padang, 2006.

Laman

Abi Sarwanto, “OSO Menang di PTUN, KPU Diminta Terbitkan SK DCT DPD RI Baru”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114162818-32-346553/oso-menang-di-ptun-kpu-diminta-terbitkan-sk-dct-dpd-ri-baru>, 14 November 2018, dikunjungi pada 18 Februari 2019.

Andhika Prasetya, “Tak Masuk DCT DPD, OSO Laporkan Komisioner KPU ke Bawaslu dan Polisi”, <https://news.detik.com/berita/d-4394892/tak-masuk-dct-dpd-oso-laporkan-komisioner-kpu-ke-bawaslu-dan-polisi>, 22 Januari 2019, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

Hari Ariyanti, “Coret OSO dari Caleg DPD, KPU Tegaskan Tak Mau Jadi Pembangkang Konstitusi”, <https://www.liputan6.com/news/read/3934844/coret-oso-dari-caleg-dpd-kpu-tegaskan-tak-mau-jadi-pembangkang-konstitusi>, 05 April 2019, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, <http://www.democracy-reporting.org/files/dri-bp-40-en-constitutional-review-in-new-democracies-2013-09.pdf>, diunduh pada 29 Mei 2019.

Lalu Rahadian, Gugatan OSO dan Dualisme Judicial Review yang Bikin Bingung, <https://tirto.id/gugatan-oso-dan-dualisme-judicial-review-yang-bikin-bingung-c87Y>, 2 November 2018, dikunjungi pada 24 Februari 2018.

Maria Rosari Dwi Putri, “MA: Pasal 60A PKPU tidak berkepastian hukum”,
<https://www.antaranews.com/berita/766225/ma-pasal-60a-pkpu-tidak-berkepastian-hukum>, 8 November 2018, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

Moh. Dani Pratama Huzaini, “Pencalonan Anggota DPD, KPU Disarankan Menempuh Upaya Ini”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c50d44c6b2/pencalonan-anggota-dpd--kpu-disarankan-menempuh-upaya-ini>, 14 Januari 2019, dikunjungi pada 18 Februari 2019.

Muhammad Addi Fauzani, “DPD dan Putusan MK”,
<https://news.detik.com/kolom/d-4142559/dpd-dan-putusan-mk>, 31 Juli 2018, dikunjungi pada 24 Februari 2018.

Nurijiyanto, “KPU : Jika OSO Masuk DCT Tanpa Mundur Akan Langgar Konstitusi”,
<http://mediaindonesia.com/read/detail/212729-kpu-jika-oso-masuk-dct-tanpa-mundur-akan-langgar-konstitusi>, 24 Januari 2019, dikunjungi pada 24 Februari 2018.

Reza Jurnaliston, “Bawaslu Putuskan Oesman Sapta Tetap Tak Bisa Jadi Calon Anggota DPD,”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/05250071/bawaslu-putuskan-oesman-sapta-tetap-tak-bisa-jadi-calon-anggota-dpd>, 12 Oktober 2018, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

Reza Jurnaliston, “Kabulkan Gugatan OSO, MA Diminta Lebih Jeli”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/01/12522521/kabulkan-gugatan-oso-ma-diminta-lebih-jeli>, 01 November 2018, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

Samdyasara Saragih, “Begini Riwayat Perebutan Kursi Pimpinan DPD Antara Hemas Oleh OSO”,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20190121/15/880878/begini-riwayat-perebutan-kursi-pimpinan-dpd-antara-hemas-oleh-oso->, 21 Januari 2019, dikunjungi pada 06 November 2019.

Sri Pujianti, “Pemohon Uji UU Pemilu Perkuat Kedudukan Hukum”,
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14464#>, 30 April 2018, dikunjungi pada 10 Juni 2019.

Sutan Sorik, “Politik Nasional : Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?”,
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi> 20 September, dikunjungi pada 18 Februari 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. 2017, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2017, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2017, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1063. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/ HUM/ 2018

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 242/G/SPPU/2018/PTUN JKT

Putusan Badan Pengawas Pemilu 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018